



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JAROT WINARNO
2. Jabatan : BUPATI
3. NHK : 48912

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 6.185.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/144 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 390 m2/72 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 151 m2/72 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 585.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 176 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 557 m2/240 m2 di NEGARA MALAYSIA, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 211.000.000**

1. MOBIL, NISSAN LIVINA MINI BUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOBIL, TOYOTA VIOS SEDAN Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 2DP RAT NAMX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
4. MOTOR, YAMAHA CBR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 56.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 16.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	248.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.660.000.000
III. HUTANG	Rp.	382.218.681
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.277.781.319

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.